

PERAN EKONOMI ISLAM DALAM MEMBANGUN AKUNTABILITAS PENGENTASAN KEMISKINAN

Muhammad Ash-Shiddiqy
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT - This study aims to analyze the role of Islamic economics in building accountability for poverty reduction in Indonesia. The methodology adopted is a literature study using a qualitative approach, reviewing relevant literature, scientific articles and empirical data. The results show that poverty reduction in the Islamic perspective does not only focus on material aspects, but also on spiritual and social aspects. Key principles such as justice, solidarity and social responsibility are the basis for implementing Islamic economic policies. Instruments such as zakat, sadaqah and infaq play an important role in wealth redistribution and sustainable empowerment of the poor. Furthermore, Islamic economics emphasizes the need for collaborative efforts between individuals, communities and the state to eradicate poverty. The study also highlights the importance of business ethics, transparency and good governance in the management of social funds so that poverty reduction projects can be carried out effectively and accountably. It is believed that Islamic economics, with its holistic approach that integrates spiritual, social and economic aspects, is able to provide a comprehensive solution to eradicate poverty and create equitable welfare. This research recommends strengthening Islamic economic education and optimizing the management of zakat and taxes to improve the accountability and effectiveness of poverty reduction programs.

Keywords: Accountability, Community Empowerment, Islamic Economics, Poverty, Zakat.

Abstrak - Peran Ekonomi Islam dalam Membangun Akuntabilitas Pengentasan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi Islam dalam membangun akuntabilitas penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Metodologi yang diadopsi adalah studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, meninjau literatur, artikel ilmiah dan data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan dalam perspektif Islam tidak hanya berfokus pada aspek material saja, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan, solidaritas dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penerapan kebijakan ekonomi Islam. Instrumen seperti zakat, sedekah dan infak berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, ekonomi Islam menekankan perlunya upaya kolaboratif antara individu, masyarakat, dan negara untuk memberantas kemiskinan. Studi ini juga menyoroti pentingnya etika bisnis, transparansi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana sosial sehingga proyek penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel. Diyakini bahwa ekonomi Islam, dengan pendekatan holistiknya yang memadukan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi, mampu memberikan solusi komprehensif untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan ekonomi Islam dan optimalisasi pengelolaan zakat dan pajak untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Ekonomi Islam, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Zakat.

PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi sebuah negara atau sistem ekonomi mana pun berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi akan menghasilkan lebih banyak peluang ekonomi dan pemerataan. Satu fakta yang tak bisa disangkal adalah bahwa perkembangan perekonomian dunia selama dua abad terakhir sudah menghasilkan dua dampak yang sangat signifikan. Pertama, kemakmuran dan taraf hidup masyarakat global semakin meningkat. Kedua, terciptanya peluang kerja baru seiring dengan pertambahannya jumlah penduduk yang meningkat. Dalam perspektif studi ekonomi Islam, tujuan utama ekonomi adalah untuk terpenuhi kebutuhan seseorang serta mengelola penggunaan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam dan kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan bijak.

Pada dasarnya kemiskinan kondisi dimana seseorang atau penduduk tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan dapat menjadi pemicu timbulnya kejahatan seperti halnya tindak pencurian. Kemiskinan juga merupakan gejala sosial yang menyatu dengan kehidupan manusia. Karena kemiskinan adalah masalah yang harus dikurangi di seluruh dunia, masalah kemiskinan sangat sensitif bagi masyarakat. Negara akan mengalami kemunduran atau terbelakang jika tidak ada upaya untuk mengurangi kemiskinan. Negara-negara maju akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, sumber daya, dan pembangunan (Adilla 2024).

Karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali dianggap sebagai komponen penting dalam kebijakan ekonomi setiap negara dan sistem ekonominya. Meskipun kemajuan pesat dalam industri, ilmu pengetahuan, dan revolusi teknologi, negara maju masih menghadapi masalah ekonomi seperti kemiskinan absolut. Ini menunjukkan bahwa perbaikan kondisi sosial dan ekonomi bagi semua kelompok masyarakat tidak selalu sejalan dengan kemajuan

ekonomi.

Krisis ekonomi yang Tengah dihadapi oleh negara-negara Islam saat ini tidak dapat sepenuhnya dapat dianggap sebagai akibat dari praktik-praktik ekonomi yang melanggar syariat Islam, seperti monopoli, korupsi, dan suap. Tidak mengherankan bahwa kita melihat krisis ekonomi saat ini karena para elit bisnis mengabaikan aturan ekonomi Islam. Ini sejalan dengan apa yang Allah SWT katakan dalam Surat Ar-Rum ayat 40 bahwa perbuatan manusia menyebabkan kerusakan di darat dan laut, dan Dia memberi mereka kesempatan untuk merasakan sebagian dari akibatnya agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Kemiskinan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi, karena pada hakikatnya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pertumbuhan ekonomi harus menjadi lebih cepat dan distribusi pendapatan harus menjadi lebih merata.

Banyak masalah yang dihadapi Indonesia akibat kemiskinan, termasuk peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan inflasi, jumlah anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Fakta bahwa banyak orang masih pengangguran dalam bekerja adalah salah satu faktor yang menyebabkan masalah kemiskinan. Pengangguran membuat sulit bagi sebagian masyarakat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kemiskinan terus meningkat.

Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim adalah mengabaikan peran agama dalam pembangunan ekonomi. Kealpaan ini berkontribusi pada kegagalan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Melihat realitas saat ini, umat Islam perlu memperkuat diri dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam menghadapi isu kemiskinan. Ini memerlukan pendekatan yang sistematis, dimulai dari penguatan pemahaman dasar, dilanjutkan dengan pengembangan konsep dan aplikasinya, hingga menggali solusi yang efektif untuk penanganannya. Penting

untuk dipahami bahwa ini sejalan dengan semangat Islam, yang tidak hanya diakui sebagai pandangan hidup, tetapi juga sebagai sistem pemikiran. Islam berfungsi sebagai pedoman yang relevan di setiap waktu dan tempat untuk membangun masyarakat yang lebih baik, serta menawarkan solusi terhadap masalah-masalah yang kompleks yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, sebuah negara dalam menghadapi persoalan kemiskinan seharusnya dapat menggali referensi berdasarkan pendekatan ekonomi Islam.

Perbaikan terus-menerus dalam kesejahteraan warga negara diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Pertama, peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan lokal tidak selalu berarti peningkatan kelas bawah atau pertumbuhan ekonomi daerah. Akibatnya, peningkatan kesejahteraan rakyat lebih penting dari pada meningkatkan pendapatan negara sebagai tujuan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, tujuan ekonomi Islam lebih luas, yaitu bahwa ekonomi pembangunan membangun sikap spiritual dan ekonomi sosial secara keseluruhan. tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani yang tidak terkait dengan dunia fisik. Pertumbuhan ekonomi kontemporer terdiri dari pembangunan ekonomi yang menaikkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Program ini secara khusus didedikasikan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi negara-negara miskin otonom (negara-negara berkembang) dalam mengembangkan ekonomi mereka setelah Perang Dunia II. Namun kenyataannya angka kemiskinan di negara berkembang meningkat. Masalah-masalah utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial-ekonomi antarmasyarakat, masih belum terselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah karena faktor-faktor lain seperti perundang-undangan sosial, politik, budaya dan variabel pembangunan lainnya tidak disertakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Dalimunthe (2021) secara umum, kemiskinan terbagi menjadi beberapa jenis. Kemiskinan subjektive adalah salah satu dari beberapa jenis dan contoh kemiskinan. Ini terjadi disebabkan seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri yang percaya bahwa kebutuhannya kurang terpenuhi, meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu miskin. Salah satu contohnya adalah pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar. Kemiskinan relatif adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat dan menyebabkan ketimpangan dalam penghasilan dan standar kesejahteraan. Salah satu contohnya adalah banyaknya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan atau sikap masyarakat yang memiliki budaya yang tenang dan tidak mau meningkatkan standar hidupnya seperti masyarakat modern. Contohnya adalah suku Badui yang kuat yang mempertahankan tradisi mereka dan menentang kemajuan.

Dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan kemiskinan, al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci dengan langkah-langkah operasional yang spesifik. Namun, al-Qur'an telah memberikan petunjuk dan beberapa anjuran yang bertujuan agar umat Islam dapat keluar dari masalah kemiskinan. Petunjuk ini mencerminkan konsep ideal yang seharusnya dijadikan pedoman oleh setiap individu, maupun dalam konteks sosial. Sayangnya, dalam kenyataan hidup saat ini, konsep ideal yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an dan sabda Nabi belum dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah, di antaranya adalah kemiskinan, serta adanya kesenjangan yang terlihat antara yang kaya dan yang miskin (Hakim dan Syaputra 2020).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) atau penelitian dengan memeriksa berbagai referensi dalam bentuk buku, jurnal, dan catatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan beberapa langkah dan pendekatan. Pendekatan kualitatif memandang penelitian sebagai keseluruhan yang seragam. Dalam aplikasi, metode penelitian ini menekankan studi kasus untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang ada dalam melakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diterima dari beberapa artikel dan publikasi jurnal lainnya sehubungan dengan tujuan penelitian. Data dari artikel dan publikasi jurnal dianggap informasi dari data yang diturunkan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Para ahli ekonomi dan fiqh yang telah memberikan perhatian besar terhadap permasalahan pertumbuhan ekonomi. Mereka mendefinisikan bahwa pertumbuhan tidak hanya sekedar aktivitas produksi. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi mencakup seluruh aspek produksi yang memiliki keterkaitan erat dengan keadilan dalam distribusi. Selain sebagai isu ekonomi, pertumbuhan juga merupakan bagian dari aktivitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik dalam aspek materiil maupun spiritual (Muzakky, Mutafarida, dan Yuliana 2024)

Dalam ekonomi islam, isu pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian utama para pemikir sejak era klasik. Salah satu pembahasannya merujuk pada firman Allah SWT. Dalam surah Hud ayat 61: “Dia yang telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya”. Ayat ini mengandung makna bahwa manusia diberikan tugas untuk mengelola dan memajukan kehidupan di bumi. Konsep pemakmuran bumi ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada gubernurnya di Mesir. Ia menekankan

pentingnya mengamati pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat lebih daripada sekadar pemungutan pajak, karena pajak hanya dapat berjalan baik jika suatu wilayah telah Makmur. Jika pajak dipungut tanpa mempertimbangkan pemakmuran, maka negara akan mengalami kehancuran.

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai perkembangan berkelanjutan dari faktor-faktor produksi yang dikelola dengan cara yang benar sehingga dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki nilai-nilai tertentu. Peningkatan produksi tidak dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi apabila dalam prosesnya mencakup barang-barang yang memiliki dampak negatif atau berbahaya bagi manusia (Muttaqin 2018).

Sepanjang sejarah, banyak prinsip dasar ekonomi Barat, baik yang berlandaskan kapitalisme maupun sosialisme, memiliki keterkaitan dengan konsep ekonomi Islam. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan ekonomi Islam yang lebih mengutamakan etika, nilai, dan moral dalam menganalisis perilaku individu. Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya kecenderungan pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga harus memperhatikan aspek spiritual dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam Islam, kesejahteraan individu dirumuskan dalam fungsi maslahat (*utility*) sebagai $U = u(M, S)$, yang mencerminkan keseimbangan antara kepuasan materi (M) dan kepuasan spiritual (S). Selain itu, ekonomi Islam juga harus mampu menjawab pertanyaan mengenai mana yang lebih diutamakan dalam pertumbuhan ekonomi, apakah pemerataan kesejahteraan (*growth with equity*) atau sekadar pertumbuhan ekonomi itu sendiri (*growth an sich*). Islam menegaskan bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan harus berjalan beriringan. Pertumbuhan ekonomi memang menjadi kebutuhan, tetapi pemerataan juga tidak boleh diabaikan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Islam tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi karena keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Di sisi lain, Islam menekankan pentingnya pemerataan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mencerminkan kesejahteraan secara menyeluruh, terutama jika pendapatan dan faktor produksi hanya berpusat pada segelintir kelompok dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam perspektif ekonomi Islam, diperlukan pendekatan baru dalam pembangunan yang tidak hanya berfokus pada model pertumbuhan agregatif yang menjadikan peningkatan ekonomi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Dengan demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita bukanlah tujuan utama. Sebab, angka pendapatan per kapita yang tinggi tidak akan berarti jika realitasnya justru menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan kesenjangan sosial yang semakin besar. Pendapatan negara dan taraf hidup masyarakat hanya dapat meningkat apabila faktor-faktor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi berfungsi secara optimal (Maria, Fadhil, dan Joni 2025)

Peran Islam Membentuk Perilaku Ekonomi

Pada prinsipnya, Allah memberikan hukum untuk membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Karena Islam memberikan bimbingan bagi seluruh aspek kehidupan, Syariah (yakni hukum Islam sebagaimana yang telah berkembang sejak awal) memberikan perhatian khusus kepada aspek moral, agama, sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan manusia (Daulay, Syahbudi, dan Lubis 2019). Oleh karena itu, orang yang berbuat berdasarkan syariat Islam dianggap telah memenuhi keinginan Allah dalam segala situasi dan perbuatannya, sehingga hukum Islam merupakan perwujudan keinginan Allah. (Ja'far 2024).

Ekonomi Islam berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat, dan keberadaannya diharapkan mampu menggantikan sistem ekonomi tradisional yang dinilai lemah dalam mengonsolidasikan perekonomian dunia. Sistem ekonomi Islam seharusnya mampu berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara, khususnya Indonesia. Ketika ekonomi Islam mulai berkembang, istilah “ekonomi konvensional” mulai muncul. Dulu kita biasa menyebut istilah ekonomi tradisional dengan istilah

ekonomi. Berikut ini merupakan perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional (Mujib 2019).

Menurut Moch. Zainuddin (2017) dalam perspektif ekonomi syariah, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Sumber daya yang dapat diinvestasikan (*Investible Resources*)

Sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian, seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya modal. SDA merupakan anugerah dari Allah yang telah disediakan bagi manusia untuk dimanfaatkan dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, dalam aspek sumber daya modal, dana yang dapat dioptimalkan salah satunya berasal dari tingkat tabungan (*saving rate*) masyarakat dalam suatu negara. *Saving rate* ini mencerminkan jumlah dana yang disimpan dalam bentuk tabungan dan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Salah satu indikasi dari peran perbankan syariah dalam hal ini adalah *financing to deposit ratio* (FDR), yaitu rasio dana yang dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk sektor riil. Dengan sistem keuangan berbasis sektor riil, perbankan syariah cenderung memiliki FDR yang mendekati 100 persen, yang berarti hampir seluruh dana nasabah disalurkan untuk pembiayaan sektor produktif.

2. Sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Karena ekonomi syariah berlandaskan pada sektor riil, keberadaan sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan menjadi sangat penting. Negara-negara seperti Jepang dan Singapura memiliki persentase pengusaha yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sekitar 10 persen dan 4 persen dari total populasi. Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan

UMKM pada tahun 2012, jumlah wirausahawan di Indonesia baru mencapai 0,18 persen dari total penduduk. Padahal, wirausahawan merupakan aktor utama dalam membangun kemandirian ekonomi. Untuk mencapai kemandirian tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu optimalisasi potensi lokal dan penguatan budaya bisnis syariah. Optimalisasi potensi lokal dapat dilihat dari sejauh mana suatu negara mampu mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sendiri tanpa ketergantungan terhadap produk luar negeri. Ketergantungan yang tinggi pada impor justru akan melemahkan kemandirian ekonomi suatu bangsa. Sebagai contoh, jika suatu negara lebih memilih mengimpor buah daripada memproduksi sendiri hanya karena alasan harga yang lebih murah, maka dalam jangka panjang ketergantungan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, penguatan budaya bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah juga sangat penting. Islam memiliki ajaran yang menekankan pentingnya etika dalam berbisnis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi: *“Sebaik-baik penghasilan adalah yang diperoleh oleh pedagang yang jujur, tidak berbohong, tidak mengkhianati amanah, tidak ingkar janji, tidak mencela saat membeli, tidak berlebihan dalam menaikkan harga saat menjual, tidak menunda pembayaran utang, serta tidak menekan orang yang kesulitan dalam membayar utang.”* Hadis ini menggambarkan bagaimana prinsip bisnis yang berlandaskan kejujuran dan keadilan dapat menjadi kunci utama dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

3. Teknologi dan inovasi

Teknologi menciptakan efisiensi dalam berbagai aspek ekonomi, sementara inovasi menjadi fondasi utama dalam perkembangan teknologi. Oleh karena itu, inovasi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah agar dapat berkembang secara sistematis. Islam sendiri mendorong umatnya untuk terus berinovasi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang berkarya (al-mu'min*

al-muhtarif).”

Menurut al-Tariqi, Islam harus memiliki karakteristik khusus agar tujuan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai (Muttaqin 2018). Salah satu karakteristik tersebut adalah :

1. komprehensif (al-Syumul). Dalam pandangan Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek materi, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas dan universal dibandingkan sistem ekonomi kontemporer yang hanya berorientasi pada pencapaian kesejahteraan material. Tujuan utama pertumbuhan ekonomi dalam Islam adalah mewujudkan keadilan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek material, moral, sosial, spiritual, dan fiskal. Kebahagiaan yang dicita-citakan bukan hanya kesejahteraan duniawi, tetapi juga kebahagiaan di akhirat (Rizal Muttaqin,2018).
2. Prinsip keseimbangan (Tawazun) dalam pertumbuhan ekonomi Islam menekankan bahwa peningkatan produksi bukan satu-satunya tujuan utama, melainkan harus didasarkan pada asas keadilan dalam distribusi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang menyatakan bahwa keadilan adalah hal yang paling dekat dengan ketakwaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan berbagai sektor secara adil. Islam tidak membenarkan kebijakan pembangunan yang hanya berfokus pada perkotaan sementara pedesaan terabaikan, atau pengembangan industri yang mengesampingkan sektor pertanian. Demikian pula, percepatan pembangunan dalam satu bidang tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendasar bagi Masyarakat (Rizal Muttaqin,2018).
3. Prinsip realitas (Waqi'iyah) dalam Islam mengacu pada pendekatan yang sesuai dengan kondisi nyata dalam kehidupan. Dalam berbagai teori sosial, realisme menjadi elemen penting karena suatu konsep yang bersifat utopis dan jauh dari kenyataan akan sulit diterapkan serta diterima oleh

masyarakat. Sebagai agama yang berasal dari Allah, Islam menetapkan aturan yang tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, realitas dan idealitas berjalan seiring, di mana nilai-nilai ideal yang diajarkan tetap relevan dengan kondisi nyata dan memungkinkan untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (Rizal Muttaqin, 2018).

4. Prinsip keadilan ('Adalah) dalam pertumbuhan ekonomi menegaskan bahwa peningkatan ekonomi harus dibarengi dengan distribusi yang adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90, yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, serta membantu sesama, sekaligus melarang segala bentuk kemungkaran dan permusuhan. Jika melihat kenyataan yang ada, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, tidak hanya di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat yang menjadi pusat kapitalisme. Oleh karena itu, penting bagi pertumbuhan ekonomi untuk berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin besar (Rizal Muttaqin, 2018).
5. Prinsip tanggung jawab (Mas'uliyah) dalam Islam menegaskan bahwa kebebasan individu dalam berbagai bidang, termasuk dalam menikmati kehidupan duniawi, bukanlah kebebasan tanpa batas. Islam memberikan kebebasan yang tetap dalam koridor aturan, sehingga hak setiap individu tidak merugikan orang lain dan dapat menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu, prinsip tanggung jawab juga berkaitan dengan aspek keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang baik harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang dilakukan harus berorientasi pada keberlanjutan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Rizal Muttaqin 2018).
6. Prinsip kecukupan (Kifayah) dalam Islam tidak hanya menekankan pada

tanggung jawab semata, tetapi juga memastikan bahwa tanggung jawab tersebut harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Para ulama fikih telah menetapkan bahwa dalam pengalokasian harta, harus ada keseimbangan yang memungkinkan setiap individu memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dalam batas yang layak dan wajar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga tidak ada kesenjangan yang berlebihan di tengah Masyarakat (Rizal Muttaqin,2018).

Prinsip berorientasi pada manusia (Ghayatuha al-Insan) dalam Islam berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang umumnya hanya berfokus pada aspek fisik dan material. Islam memperluas cakupan pembangunan dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya. Meskipun Islam memberi perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini tetap dipandang sebagai bagian dari tujuan yang lebih luas, yaitu pembangunan manusia secara menyeluruh. Islam memiliki peran utama dalam membimbing manusia menuju jalan yang benar dan arah yang tepat. Oleh karena itu, setiap aspek dalam pembangunan ekonomi harus selaras dengan upaya membangun kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan (Rizal Muttaqin,2018).

Landasan Ekonomi Islam

a. Tauhid sebagai Landasan Spiritual Ekonomi

Tauhid merupakan inti dari seluruh ajaran Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sebagai konsep yang menegaskan keesaan Allah, tauhid memberikan kerangka kerja yang mendasari seluruh perilaku manusia, termasuk dalam mengelola sumber daya ekonomi. Tauhid mengajarkan bahwa seluruh kekayaan yang ada di dunia adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pengelola atau khalifah. Pemahaman ini mendorong individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia,

tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik segala sesuatu.

b. Keadilan sebagai Pilar Ekonomi yang Berkeadaban

Tauhid memberikan landasan spiritual yang mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sementara keadilan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ini menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan spiritual. Dalam implementasinya, integrasi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem keuangan syariah, pengelolaan zakat yang transparan, dan penguatan sektor ekonomi halal.

c. Mewujudkan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera

Dalam konteks landasan teologi ekonomi Islam, mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera merupakan manifestasi dari nilai-nilai tauhid dan keadilan yang menjadi fondasi utama. Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan tauhid mengakui bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak atas segala sumber daya, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang diamanahkan untuk mengelola sumber daya tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dimana aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata tetapi juga harus memberikan manfaat sosial. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan maqashid syariah. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam distribusi kekayaan, memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya tanpa eksploitasi. Selain itu, ekonomi Islam melarang praktik riba dan gharar dalam transaksi untuk menjaga keadilan dan transparansi.

Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Islam hadir dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam hal kemiskinan, Islam memperhatikan secara serius konsep dan praktiknya. Saad Ibrahim menyatakan bahwa "fakir" dan "miskin" adalah istilah familiar untuk menggambarkan kemiskinan karena mereka menunjukkan kondisi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi (Ismail 2020). Krisis ekonomi, dari perspektif Islam, tidak terlepas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami, seperti praktik riba, monopoli, korupsi, dan berbagai bentuk malpraktek lainnya. Ketika para pelaku ekonomi terbiasa mengambil langkah-langkah di luar petunjuk ekonomi Ilahiah, maka tidaklah mengherankan jika krisis yang kita alami saat ini merupakan sebuah malapetaka yang seolah kita undang sendiri melalui perbuatan manusia. (Umi dkk. 2022).

Kesulitan negara-negara Islam dalam mencapai kesejahteraan hidup dapat disebabkan oleh pendekatan penanganan kemiskinan yang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Islam. Penekanan pada aspek materi dalam menilai kemiskinan tidak dianggap sebagai solusi yang tepat bagi negara-negara tersebut. Penanganan yang ada lebih terfokus pada memenuhi kebutuhan materi masyarakat yang belum mencapai standar kehidupan yang layak. Karena kebutuhan dasar manusia bukan hanya yang materi tetapi juga yang spiritual, peningkatan kesejahteraan spiritual dapat membantu mengatasi kemiskinan dan masalah lain seperti tindakan kriminal yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi (Ismail 2020).

Islam memandang masalah kemiskinan sebagai persoalan yang dihadapi ketika kebutuhan-kebutuhan primer tidak terpenuhi secara keseluruhan. Dalam syariat Islam, kebutuhan utama yang berkaitan dengan eksistensi manusia terdapat pada tiga aspek, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah SWT berfirman, "Kewajiban ayah adalah memberikan makan serta pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf" (QS Al-Baqarah [2]:233) dan "Tempatkanlah mereka (para istri) di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuanmu" (QS Ath-Thalaq [65]:6). Dengan demikian, siapapun dan di

manapun mereka berada, jika manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan utama seperti sandang, pangan, dan papan, maka ia dapat digolongkan sebagai orang yang fakir atau miskin. Oleh karena itu, setiap upaya pemulihan ekonomi yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan harus diarahkan kepada mereka yang termasuk dalam kelompok tersebut. Ini mencakup orang-orang yang mungkin memiliki pekerjaan tetapi masih tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara yang layak, serta mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena di-PHK atau alasan lainnya.

Penyebab Kemiskinan Dalam Islam

Penjelasan Al-Quran tentang latar belakang kemiskinan berbeda dengan analisis para ahli sosial. Para pakar sosial membagi penyebab dan bentuk kemiskinan ke dalam tiga kategori: kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural, tetapi Al-Quran memberikan pandangan yang berbeda. Dalam Al-Quran, Allah tidak mengatakan bahwa kemiskinan yang dialami manusia disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang tersedia (kemiskinan alamiah). Al-Quran menjelaskan bahwa Allah telah menyediakan semua fasilitas yang cukup bagi kehidupan manusia dan membuat bumi ini mudah untuk digunakan (QS.Al-Mulk:15). Oleh karena itu, jika manusia, sekalipun dengan segala sumber daya dan sarana yang diberikan Allah, masih saja menghadapi masalah kemiskinan, maka penyebab utama dari permasalahan ini terletak pada diri manusia itu sendiri. Berikut adalah beberapa isyarat dalam al-Qur'an yang membahas faktor penyebab kemiskinan yang dialami oleh umat manusia. (Hakim dan Syaputra 2020).

Dalam Islam, pengetahuan merupakan alat penting untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Nabi Muhammad Abdullah (Rasulullah SAW) bersabda bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Pengetahuan yang memadai dapat membantu orang meningkatkan keterampilannya, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan menjadi orang yang lebih baik. Dalam Islam, kemiskinan bukan hanya kekurangan hal-hal materi; ini melibatkan aspek spiritual, moral, sosial dan ekonomi.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, diharapkan kemiskinan dapat diatasi secara efektif dan masyarakat dapat hidup sejahtera dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Selain kekurangan materi, kemiskinan juga melibatkan dimensi spiritual, moral dan sosial. Dalam ajaran Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana individu atau masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Dalam Islam, kemiskinan didefinisikan tidak hanya sebagai kurangnya kekayaan materi tetapi juga sebagai kurangnya sumber daya yang cukup untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup ini dan akhirat. Kemiskinan spiritual terjadi ketika seseorang kehilangan hubungan kuat dengan Allah, kehilangan rasa syukur, dan menjadi tidak puas. Sebaliknya, kemiskinan moral merujuk pada keadaan di mana seorang individu atau komunitas terperosok dalam kesalahan, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu Islam menekankan pentingnya kekayaan spiritual dan moral sebagai sarana mengatasi kemiskinan. Keadilan sosial adalah prinsip dasar Islam (Shilat, Andreansyah, dan Firdaus 2024)

Kapitalis yang memprioritaskan lebih banyak nilai ekonomi daripada nilai-nilai lain menciptakan ketidaksetaraan dan kesenjangan, yang menyebabkan orang miskin dan kaya. Ini ditunjukkan dengan menerapkan nilai-nilai politik untuk mempekerjakan karyawan secara tidak adil dari berbagai kesenjangan dalam kehidupan sosial.

Status kemiskinan dapat disebabkan oleh empat penyebab: pertama, pendidikan tingkat bawah. Tingkat pendidikan yang rendah mengarah pada keterampilan pengembangan diri yang terbatas, yang mengarah pada hal-hal yang dekat dengan pekerjaan yang dapat dimasukkan. Tingkat pendidikan ditentukan dalam kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang ada. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan individu untuk mencari dan memanfaatkan berbagai peluang. Selain itu, masalah kesehatan yang kurang baik juga menjadi faktor yang signifikan. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan gizi berpengaruh pada daya

tahan fisik, kemampuan berpikir, dan inisiatif seseorang. Selanjutnya, terbatasnya lapangan kerja memperparah situasi kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan kesehatan. Selama terdapat kesempatan kerja atau kegiatan usaha, akan selalu ada harapan untuk memutus siklus kemiskinan. Terakhir, kondisi keterisolasian juga menjadi tantangan besar. Banyak individu yang berada dalam keadaan miskin secara ekonomi merasakan kesulitan akibat terisolasi secara geografis. Mereka tinggal di daerah terpencil sehingga sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya. (Maulana, Fasa, dan Suharto 2022; Suaidi Suaidi 2023).

Strategi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan

Dari sudut pandang Islam, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan barang-barang material, tetapi lebih penting lagi sebagai ketidaksesuaian antara kebutuhan dasar manusia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap kemiskinan melampaui sekadar bantuan finansial; ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan etos kerja. (Mundir dkk. 2025).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, kita harus memahami akar penyebab kemiskinan dan merumuskan strategi untuk memerangi kemiskinan. Suatu strategi penanggulangan kemiskinan mungkin berhasil dari sudut pandang Barat, tetapi jika dilihat dari sudut pandang Islam, strategi tersebut akan gagal karena faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an terus-menerus disebutkan bahwa kemiskinan merupakan tanda bahwa kemiskinan merupakan persoalan kehidupan yang sangat rumit. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya harus menerapkan pendekatan makro (menyeluruh) dan komprehensif yang tidak hanya mensyaratkan peran serta dan aktif masyarakat miskin saja, tetapi juga terkait dengan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya (Majid 2011).

Pengentasan Kemiskinan Islam memiliki aneka macam prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang bisa dijadikan pedoman bagi program pengentasan kemiskinan serta sekaligus penciptaan lapangan kerja, yaitu:

1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sebuah konsep yang dikenal dengan istilah *pro-poor growth*. *Pro-poor growth* dalam Islam tercapai melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan dorongan terhadap aktivitas sektor riil. Dengan melarang riba, inflasi dapat terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas perekonomian dapat terwujud. Di sisi lain, Islam juga mengarahkan modal ke dalam kegiatan ekonomi yang produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis, seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat. Dengan pendekatan ini, tercipta sinergi antara sektor riil dan moneter, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkesinambungan.
2. Islam mengarahkan pembuatan anggaran negara yang mendukung kepentingan rakyat banyak, atau yang dikenal dengan istilah *pro-poor budgeting*. Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi landasan dalam mencapai anggaran yang berpihak kepada rakyat, yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan penuh anggaran negara untuk kepentingan publik. Dalam pemerintahan Islam, defisit anggaran hampir tidak pernah terjadi, walaupun dihadapkan pada tekanan pengeluaran yang tinggi, kecuali pada masa Nabi Muhammad ketika terjadi perang. Lebih ditekankan adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam perspektif Islam, anggaran negara dipandang sebagai harta publik, sehingga anggaran harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi orang-orang miskin. Hal ini termasuk penyediaan makanan, pembayaran biaya penguburan dan utang, serta pemberian pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, serta beasiswa

bagi mereka yang belajar agama.

3. Infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat disebut infrastruktur *pro-poor infrastructure*. Selain itu, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki efek positif secara eksternal untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi ekonomi.
4. Islam mendorong pengembangan pelayanan publik dasar yang memberikan perhatian khusus kepada masyarakat luas, khususnya kelompok-kelompok yang kurang mampu. Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang menjadi fokus perhatian dalam ajaran Islam, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam perspektif Islam, birokrasi diartikan sebagai amanah yang bertujuan untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
5. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang menguntungkan masyarakat miskin. Ada tiga instrumen utama dalam Islam yang berkaitan dengan distribusi pendapatan, yaitu hukum kepemilikan tanah, penerapan zakat, dan anjuran untuk melakukan qardul hasan, infak, serta wakaf. Dalam prinsip Islam, setiap individu yang mengusahakan tanah yang tidak produktif berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Sebaliknya, jika seseorang membiarkan tanahnya terbengkalai, negara memiliki hak untuk mengambilnya dan memberikannya kepada orang lain yang siap untuk mengolahnya. Dengan penerapan zakat, konsentrasi harta pada sekelompok masyarakat dapat diminimalisir. Zakat juga menjamin bahwa setiap individu mendapatkan akses kepada kebutuhan hidup minimum, yang pada gilirannya memberi mereka peluang untuk keluar dari kemiskinan. Untuk memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, Islam sangat mendorong orang-orang yang berkecukupan untuk memberikan qard, infak, dan wakaf.

Salah satu instrumen pengentasan kemiskinan menurut islam yaitu dengan berzakat.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang melebihi nisab, atau batas tertentu, untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang kurang beruntung. Zakat dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara yang efektif dan transparan. Zakat memberikan setiap orang jaminan kehidupan minimum, yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Sedekah, selain zakat, adalah amalan Islam lainnya yang sangat berguna dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berdekah tidak semata-mata berbentuk sumbangan uang; Anda juga dapat melakukannya dengan memberi orang-orang yang kurang mampu makanan atau kebutuhan pokok lainnya. Praktik sedekah ini mendorong pembagian sumber daya yang lebih adil dan menunjukkan empati dan solidaritas di antara sesama muslim.

Pendidikan juga memiliki peran penting dalam ajaran Islam untuk mengatasi kemiskinan. Meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat akan meningkatkan peluang untuk keluar dari kemiskinan. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan mengajarkan umat Muslim untuk memahami dunia modern serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pelatihan kerja atau pendidikan keahlian dapat membantu orang Muslim mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini dapat meningkatkan keadaan keuangan mereka dan membantu pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

Selain itu, Islam memberikan dasar moral yang kuat bagi umatnya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama ini, nilai-nilai seperti kasih sayang, kedermawanan, kerja keras, dan tanggung jawab sosial sangat ditekankan. Jika orang Muslim menginternalisasi nilai-nilai ini, mereka akan termotivasi untuk membantu sesama, terutama mereka yang kurang beruntung, dengan cara-cara positif seperti memberikan donasi atau membuka lapangan pekerjaan baru (Yuli 2013).

Penerapan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif sangat bergantung pada keberadaan pendamping profesional di lapangan. Pendamping ini harus memiliki

keahlian dalam pemberdayaan masyarakat, pengetahuan agama Islam yang mendalam, serta pemahaman mengenai entrepreneurship. Kehadiran pendamping yang kompeten inilah yang akan memfasilitasi setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari awal hingga akhir, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat berlangsung dengan sukses dan berdampak positif dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

Konsep Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam dunia pendidikan, Ibnu Khaldun mulai belajar dari guru pertamanya, yaitu ayahnya. Sejak usia dini, ia telah menguasai al-Qur'an dan mempelajari tajwid. Selain itu, ia juga mendalami ilmu agama, fisika, dan matematika dari berbagai ulama yang datang dari Andalusia ke Tunisia. Ia selalu meraih prestasi yang memuaskan dalam semua mata pelajaran. Namun, studinya berhenti pada tahun 749 H. Ketika berusia 17 tahun, daerah tempat tinggalnya diserang oleh wabah penyakit pes yang merenggut ribuan jiwa. Peristiwa yang dikenal sebagai Black Death ini menyebabkan para ulama dan pemimpin berpindah ke Maroko (Asrofi 2021; Ulum dan Mufarrohah 2016).

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi Islam, khususnya di Indonesia. Salah satu ide utama yang dia kemukakan adalah konsep 'asabiyyah', yang berhubungan dengan solidaritas dalam masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat solidaritas sosial yang ada di masyarakat tersebut. Gagasan ini sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan nilai-nilai solidaritas ini untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berlandaskan pada kepentingan kolektif, seperti koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro. Dalam konteks ini, konsep 'asabiyyah' mendorong kolaborasi antarindividu untuk mencapai kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya pemerintah dalam memastikan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan yang adil dan efisien. Gagasan ini tercermin dalam berbagai kebijakan ekonomi di Indonesia yang menekankan pada pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Inisiatif untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat yang mengedepankan keadilan sosial adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun. Negara diharapkan berfungsi sebagai pengatur yang adil dalam distribusi kekayaan, selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan bagi masyarakat. Siklus perubahan dalam ekonomi yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun juga memberikan pemahaman berharga dalam melihat dinamika ekonomi Indonesia. Menurut Ibnu Khaldun, ekonomi suatu negara akan mengalami fase-fase kemakmuran dan kemunduran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas kepemimpinan dan cara pembagian kekayaan.

Dalam konteks Indonesia, perubahan ekonomi yang sangat cepat dalam suatu periode, seperti selama masa reformasi, sering kali disertai dengan krisis yang menyerang perekonomian. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai siklus ekonomi ini memberikan pemahaman tentang mengapa Indonesia kerap mengalami ketidakstabilan ekonomi, baik yang disebabkan oleh faktor dari dalam maupun luar. Oleh karena itu, pengetahuan tentang konsep ini dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih kuat menghadapi perubahan ekonomi. Keterkaitan pemikiran Ibnu Khaldun juga tampak dalam kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, penghindaran dari eksploitasi, dan distribusi kekayaan yang merata, sangat sesuai dengan ajaran Ibnu Khaldun. Di Indonesia, pengembangan sektor ekonomi syariah, termasuk layanan perbankan syariah, pasar modal syariah, serta praktik zakat dan wakaf, menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, lembaga zakat dan wakaf berperan krusial dalam penyebaran kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, yang merupakan salah satu bentuk pemerataan yang diperjuangkan oleh Ibnu Khaldun.

Secara keseluruhan, pandangan Ibnu Khaldun menyediakan dasar yang kokoh untuk memajukan ekonomi Indonesia dengan cara yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Pemikiran mengenai pentingnya solidaritas sosial, pengaruh negara dalam ekonomi, serta siklus perubahan ekonomi sangat berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan menggabungkan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan ekonomi, Indonesia mampu membangun sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi yang adil dan kesejahteraan social (Gusfira dkk. 2024).

KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi semata, tetapi juga sebagai ujian dan tanggung jawab sosial. Islam menawarkan solusi komprehensif yang melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu, Islam menekankan pentingnya etika bisnis yang adil, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dalam Islam membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan individu, masyarakat, dan negara, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan solidaritas.

SARAN

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Program edukasi dan pelatihan yang berfokus pada manajemen keuangan, investasi halal, dan kewirausahaan berbasis syariah dapat membantu masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan kemiskinan, untuk lebih memahami dan memanfaatkan ekonomi Islam sebagai alat pengentasan kemiskinan.

Penerapan Zakat dan Infaq Secara Optimal. Pengelolaan zakat dan infaq yang transparan dan akuntabel harus diperkuat agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan. Peningkatan sinergi antara lembaga zakat dengan program-program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas distribusi dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, Muhammad Syiddiqi. 2024. "Solusi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2):1180–90. doi:10.47467/elmujtama.v4i2.4991.
- Asrofi, Imam. 2021. *Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Ishaq Al-Syatibi*.
- Dalimunthe, Mawardi. 2021. "Mengatasi Kemiskinan dalam Islam (Kajian Al-Quran dan Al-Hadis)." *Journal of Islamic Law El Madani* 1(1):31–39.
- Daulay, Aqwa Naser, Muhammad Syahbudi, dan Fauzi Arif Lubis. 2019. *Ekonomi Makro Islam*. Medan.
- Gusfira, Adelia, Azza Bunaia, Valina Sinka, Ahmad Wahyudi Zein, Universitas Islam, Negeri Sumatera, dan Utara Medan. 2024. "Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia." *Moral : Jurnal kajian Pendidikan Islam* 1(4):295–301.
- Hakim, Lukman, dan Ahmad Danu Syaputra. 2020. "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(3):629–44. doi:10.29040/jiei.v6i3.1310.
- Ismail. 2020. "Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam." *ESA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1):110–34.
- Ja'far, A. Kumedi. 2024. "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(1):7563–75.
- Majid, M. Shabri Abd. 2011. "Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'Ah." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 1(2):197–205.

doi:10.20885/jeki.vol1.iss2.art6.

- Maria, Elma, Ulfah Fadhil, dan Alpani Joni. 2025. "Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* 3(1):176–88.
- Maulana, Angga, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto. 2022. "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15(1):220–29. doi:10.46306/jbbe.v15i1.142.
- Moch. Zainuddin. 2017. "Pertumbuhan Ekonomi Persepektif Islam." *Istithmar* 1(2):79–85.
- Mujib, Abdul. 2019. "Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(1):148.
- Mundir, Ahmad, M. Imron Rosidi, Nurul Setianingrum, dan Retna Anggitaningsih. 2025. "Peran Ekonomi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." 7(1):33–44.
- Muttaqin, Rizal. 2018. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspekif Ekonomi Islam." *Iqtishoduna* 1(2):117–24. doi:10.18860/iq.v3i2.255.
- Muzakky, Achamd Ilham Syiham, Binti Mutafarida, dan Yuliana. 2024. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1(3):463–73. doi:10.62504/nexus767.
- Shilat, Najam Fush, Feri Andreansyah, dan Luthvia Aziza Firdaus. 2024. "Kemiskinan Dalam Islam : Faktor Penyebab dan Solusinya." 1(2):162–75.
- Suaidi Suaidi. 2023. "Korelasi Penyebab Kemiskinan Dengan Kepedulian Muslim." *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa* 2(4):171–84. doi:10.58192/insdun.v2i4.1496.
- Ulum, Bahrul, dan Mufarrohah. 2016. "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(2):17–32. doi:10.35897/iqtishodia.v1i2.62.
- Umi, Novia Turmina, Rahma Apriani, Maya Puspita Sari, Ratriana Pundarika, dan Heni Noviarita. 2022. "Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan

Di Indonesia Dalam Pandangan Islam.” *Salam (Islamic Economics Journal)* 3(2):101. doi:10.24042/slm.v3i2.10306.

Yuli, Sri Budi Cantika. 2013. “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Innovation in Business and Economics* 4(2):101–12. doi:10.22219/jibe.vol4.no2.101-114.